

# *Jurnal* Ekonomi & Kebijakan Publik

Mensinergikan Kebijakan dan Pemberdayaan Ekonomi

VOL. 10, NO. 1, JUNI 2019

P-ISSN: 2086-6313

E-ISSN: 2528-4673

**PERTUMBUHAN EKONOMI PROVINSI DI INDONESIA BERDASARKAN  
INDEKS KOMPOSIT PERTUMBUHAN INKLUSIF DAN FAKTOR YANG MEMENGARUHINYA**

*Saputri Kusumaningrum dan Risni Julaeni Yuhan*

**THE SPILLOVER EFFECTS FROM FOREIGN DIRECT INVESTMENT (FDI) ON LABOR PRODUCTIVITY:  
EVIDENCE FROM INDONESIAN MANUFACTURING SECTOR**

*K. Riesta*

**ANALISIS FAKTOR INFLASI BULANAN PROVINSI BANTEN 2011-2017**

*Euis Naya Sari*

**KERUGIAN EKOLOGIS DALAM PEMBANGUNAN DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

*Margiyono, Ahmad Fauzi, Ernan Rustiadi, dan Bambang Juanda*

**ISU SOSIAL-BUDAYA DAN EKONOMI SEPUTAR FENOMENA PENJUAL MADU  
WARGA SUKU BADUY KE WILAYAH DKI JAKARTA DAN SEKITARNYA**

*Hariyadi*

**MODEL SISTEM DINAMIS: SIMULASI FORMULASI KEBIJAKAN PUBLIK**

*Lesmana Rian Andhika*

**HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN**

# *Jurnal* Ekonomi & Kebijakan Publik

Mensinergikan Kebijakan dan Pemberdayaan Ekonomi

VOL. 10, NO. 1, JUNI 2019

P-ISSN: 2086-6313

E-ISSN: 2528-4673

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	v-vi
Abstrak .....	vii-xiii
<b>PERTUMBUHAN EKONOMI PROVINSI DI INDONESIA BERDASARKAN INDEKS KOMPOSIT PERTUMBUHAN INKLUSIF DAN FAKTOR YANG MEMENGARUHINYA</b> <i>Saputri Kusumaningrum dan Risni Julaeni Yuhan</i> .....	1-17
<b>THE SPILLOVER EFFECTS FROM FOREIGN DIRECT INVESTMENT (FDI) ON LABOR PRODUCTIVITY: EVIDENCE FROM INDONESIAN MANUFACTURING SECTOR</b> <i>K. Riesta</i> .....	19-30
<b>ANALISIS FAKTOR INFLASI BULANAN PROVINSI BANTEN 2011-2017</b> <i>Euis Naya Sari</i> .....	31-41
<b>KERUGIAN EKOLOGIS DALAM PEMBANGUNAN DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR</b> <i>Margiyono, Ahmad Fauzi, Ernan Rustiadi, dan Bambang Juanda</i> .....	43-55
<b>ISU SOSIAL-BUDAYA DAN EKONOMI SEPUTAR FENOMENA PENJUAL MADU WARGA SUKU BADUY KE WILAYAH DKI JAKARTA DAN SEKITARNYA</b> <i>Hariyadi</i> .....	57-72
<b>MODEL SISTEM DINAMIS: SIMULASI FORMULASI KEBIJAKAN PUBLIK</b> <i>Lesmana Rian Andhika</i> .....	73-86

**HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN**

## KATA PENGANTAR

Setelah pembaca disuguhkan berbagai tulisan pada edisi Vol. 9, No. 2, Desember 2018 maka pada kesempatan ini Redaksi Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik edisi Vol. 10, No. 1 Juni 2019, kembali menghadirkan 6 (enam) tulisan untuk pembaca. Sebagaimana dengan edisi-edisi terdahulu, edisi kali ini menyuguhkan beberapa tulisan terkait isu makro ekonomi dan lingkungan (*environment*).

*Tulisan pertama* yang ditulis Saputri Kusumaningrum dan Risni J. Yuhan, menjelaskan mengenai pertumbuhan inklusif dan faktor-faktor yang memengaruhinya berdasarkan indeks komposit. Penulis menyimpulkan bahwa belum ada provinsi di Indonesia yang memiliki capaian pertumbuhan inklusif berkategori unggul selama tahun 2016. Sebagian besar provinsi di Indonesia justru hanya mencapai pertumbuhan inklusif dengan kategori memuaskan dan terdapat 2 provinsi yang berkategori tidak memuaskan, yaitu Provinsi Papua dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

*Tulisan kedua* berjudul “Efek *Spillover* dari *Foreign Direct Investment* (FDI) terhadap Produktivitas Tenaga Kerja: Studi pada Sektor Manufaktur Indonesia” yang ditulis K. Riesta menjelaskan pada kita bahwa pada industri yang sama ternyata *horizontal spillovers* berpengaruh negatif terhadap produktivitas perusahaan domestik dalam jangka pendek namun positif dalam jangka panjang. Sedangkan pada industri yang berbeda, *backward spillovers* berdampak negatif terhadap produktivitas perusahaan domestik. Selain itu, FDI *spillovers* memengaruhi produktivitas perusahaan domestik dengan lebih efektif ketika industri tersebut bersifat *capital-intensive*. Oleh sebab itu, penulis memberikan rekomendasi kebijakan bahwa Indonesia perlu mempertahankan perspektif jangka panjang terhadap perusahaan investasi asing. Pemerintah juga dapat menstimulasi kebijakan yang mampu meningkatkan kapasitas perusahaan domestik dalam memasok barang setengah jadi dan barang modal ke perusahaan asing di pasar hilir dengan cara memotong kesenjangan teknologi antara perusahaan asing dan perusahaan domestik.

*Tulisan ketiga* oleh Euis Naya Sari menjelaskan mengenai perkembangan atau fenomena inflasi di Provinsi Banten selama periode tahun 2011-2017. Penulis menganalisis variabel-variabel pengeluaran dari sub-kelompok yang berperan dalam menjelaskan tingkat inflasi bulanan di Provinsi Banten (Serang, Kota Tangerang, dan Kota Cilegon). Berdasarkan hasil analisis faktor dari 35 variabel subkelompok yang dipilih, hanya 26 variabel yang dapat dikelompokkan ke dalam 5 faktor, sisanya tidak masuk dalam faktor manapun. Sebanyak 26 variabel tersebut ternyata dapat menjelaskan variasi tingkat inflasi bulanan di Provinsi Banten sebesar 34 persen.

Masuk pada *tulisan keempat* yang ditulis oleh Margiyono, dkk, yang mengambil judul “Kerugian Ekologis dalam Pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur”. Tulisan ini relatif berbeda berdasarkan isunya karena membahas soal lingkungan. Menurut penulis, dengan menggunakan metode *ecological account*, menunjukkan bahwa kerugian ekologis tertinggi disebabkan oleh luasnya lahan kritis dan berikutnya akibat eksploitasi batu bara, gas bumi, dan minyak bumi. Kerugian ekologis tersebut telah mengoreksi tingkat kesejahteraan sebesar 76 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Hasil studi lainnya menunjukkan bahwa tingginya kerugian ekologis juga disebabkan oleh peraturan daerah yang berkaitan dengan lingkungan dan penegakan hukum yang lemah.

Masih terkait dengan isu lingkungan, *tulisan kelima* yang ditulis Hariyadi dari Pusat Penelitian bertopik “Isu Sosial-Budaya dan Ekonomi Seputar Fenomena Penjual Madu Warga Suku Baduy ke Wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya”, menjelaskan sebuah fenomena umum yang terjadi seiring dengan adanya pergeseran pola kehidupan, rasionalisme ekonomis, faktor pertumbuhan demografis, dan efek-tetes gaya hidup masyarakat non-Suku Baduy. Dengan menggunakan kerangka pemikiran tentang perubahan sosial dan pembangunan berkelanjutan, maka kajian ini menyimpulkan bahwa konteks kuatnya nilai-nilai sosio-kultural dan ekonomis setempat yang menjadikan lahan sebagai ‘modal kehidupan’ tidak ternilai secara ekonomis, sosio-kultural dan ekologis. Sedangkan fenomena alih fungsi lahan tidak memiliki korelasi yang kuat dengan fenomena masyarakat Suku Baduy yang menjual madu ke Jabodetabek.

Tulisan terakhir dengan topik “Model Sistem Dinamis: Simulasi Formulasi Kebijakan Publik” yang ditulis oleh Lesmana R. Andhika. Penulis menjelaskan bahwa sistem dinamis dapat dijadikan sebagai instrumen dalam perumusan suatu kebijakan publik. Selain itu, Model Sistem Dinamis dapat melihat perubahan-

perubahan perilaku kebijakan dan memungkinkan skema umpan balik (*feed back*) untuk memberikan arus informasi merancang formulasi kebijakan yang lebih kompleks. Model simulasi formulasi kebijakan dengan sistem dinamis digunakan aspek *analysis, planning, dan control*. Ketiga aspek ini menyediakan sarana untuk menilai kemungkinan penyebab penyimpangan dan menghasilkan berbagai kemungkinan analisis dari berbagai sumber informasi, metode, referensi untuk menetapkan umpan balik dari semua analisis yang terkait dalam sistem dinamis.

Keenam tulisan tersebut dapat menjadi bahan acuan bagi para pembaca atau penulis lain dalam melakukan riset atau kajian serta sebagai sumbangsih dalam memberi solusi terhadap beberapa permasalahan dalam pengelolaan makro ekonomi serta pengelolaan lingkungan. Semoga tulisan-tulisan pada edisi pertama tahun 2019 ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan memberikan alternatif pemikiran mengenai beberapa persoalan atau fenomena yang dihadapi, baik oleh pemerintah maupun masyarakat pada saat ini dan ke depan.

Sekian dan terima kasih.

Jakarta, Juni 2019

Dewan Redaksi Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik

# Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik

Mensinergikan Kebijakan dan Pemberdayaan Ekonomi

VOL. 10, NO. 1, JUNI 2019

P-ISSN: 2086-6313

E-ISSN: 2528-4673

Kata kunci bersumber dari artikel. Lembar abstrak ini boleh difotokopi.

**Saputri Kusumaningrum** (Politeknik Statistika STIS) dan **Risni Julaeni Yuhan** (Politeknik Statistika STIS)

## **PERTUMBUHAN EKONOMI PROVINSI DI INDONESIA BERDASARKAN INDEKS KOMPOSIT PERTUMBUHAN INKLUSIF DAN FAKTOR YANG MEMENGARUHINYA**

*JEKP*, Vol. 10, No. 1, Juni 2019, hal. 1-17

### **Abstrak**

Pada tahun 2016, pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang tinggi di beberapa provinsi di Indonesia ternyata diikuti pula ketimpangan pendapatan, kemiskinan, dan penganggurannya yang tinggi, seperti di Papua, Gorontalo, dan Sulawesi Tenggara. Kondisi tersebut tentu saja belum sesuai dengan konsep pertumbuhan inklusif, di mana dalam mencapai pertumbuhan ekonomi maka seluruh lapisan masyarakat harus ikut serta dalam prosesnya dan dapat menikmati hasilnya. Berdasarkan hal tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat capaian pertumbuhan inklusif provinsi di Indonesia pada tahun 2016 dan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi capaian tersebut. Pendekatan penelitian menggunakan 2 metode, yaitu indeks komposit pertumbuhan inklusif yang diadopsi dari McKinley (2010) dan regresi berganda untuk menjawab terkait faktor-faktor yang memengaruhinya. Data yang digunakan bersumber dari Badan Pusat Statistik, Kementerian Kesehatan, dan Bank Indonesia. Hasil analisis menunjukkan bahwa ternyata belum ada provinsi di Indonesia yang memiliki capaian pertumbuhan inklusif berkategori unggul (nilai indeks: 8-10) selama tahun 2016. Sebagian besar provinsi di Indonesia mencapai pertumbuhan inklusif dengan kategori memuaskan (nilai indeks: 4-7) dan terdapat dua provinsi yang memiliki kategori tidak memuaskan (nilai indeks: < 4), yaitu Provinsi Papua dan Nusa Tenggara Timur. Selain itu, penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan inklusif provinsi di Indonesia menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa pembentukan modal tetap bruto, keterbukaan perdagangan, dan rasio kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terhadap PDRB memengaruhi pertumbuhan inklusif.

**Kata kunci:** pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan inklusif, indeks komposit pertumbuhan inklusif

K. Riesta (Universitas Kobe)

**EFEK SPILLOVER DARI FOREIGN DIRECT INVESTMENT (FDI)  
TERHADAP PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA: STUDI PADA SEKTOR MANUFAKTUR INDONESIA**

JEKP, Vol. 10, No. 1, Juni 2019, hal. 19-30

**Abstrak**

Meskipun perhatian terkait manfaat *foreign direct investment* (FDI) terhadap produktivitas semakin berkembang, masih sedikit penelitian yang menguji pengaruh FDI *spillovers* terhadap produktivitas tenaga kerja pada perusahaan domestik di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan tiga hal. Pertama, menguji pengaruh FDI *spillovers* terhadap produktivitas perusahaan domestik. Kedua, menginvestigasi dampak jangka pendek dan jangka panjang dari FDI *spillovers* terhadap produktivitas perusahaan domestik. Ketiga, menelaah lebih dalam dampak dari FDI *spillovers* terhadap produktivitas perusahaan domestik pada kelompok industri yang berbeda berdasarkan intensitas faktor produksinya. Penelitian ini menggunakan mikro panel data yang mencakup kurang lebih 20.000 perusahaan industri manufaktur sedang dan besar tiap tahunnya pada tahun 2010-2014. Hasil estimasi menunjukkan bahwa, di industri yang sama, *horizontal spillovers* memiliki pengaruh negatif terhadap produktivitas perusahaan domestik di jangka pendek namun positif pada jangka panjang. Hasil estimasi juga menunjukkan bahwa, di industri yang berbeda, *backward spillovers* berdampak negatif terhadap produktivitas perusahaan domestik. Selain itu, FDI *Spillovers* memengaruhi produktivitas perusahaan domestik dengan lebih efektif ketika industri tersebut *capital-intensive*. Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan pentingnya mempertahankan perspektif jangka panjang terhadap perusahaan investasi asing di Indonesia, dan pemerintah perlu untuk menstimulasi kebijakan yang dapat meningkatkan kapasitas perusahaan domestik dalam memasok barang setengah jadi dan barang modal ke perusahaan asing di pasar hilir dengan cara memotong kesenjangan teknologi antara perusahaan asing dan domestik.

**Kata kunci:** FDI *spillovers*, *horizontal spillover*, *backward spillover*, produktivitas tenaga kerja

Euis Naya Sari (Pusdiklat Badan Pusat Statistik)

**ANALISIS FAKTOR INFLASI BULANAN PROVINSI BANTEN 2011-2017**

JEKP, Vol. 10, No. 1, Juni 2019, hal. 31-41

**Abstrak**

Perkembangan tingkat perekonomian dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya adalah inflasi. Sementara itu tingkat inflasi sendiri banyak dipengaruhi oleh beberapa variabel, seperti pengeluaran yang dikelompokkan menjadi berbagai subkelompok. Dengan demikian, pemahaman tentang perkembangan tingkat inflasi sangat penting untuk diketahui oleh pemerintah daerah agar dapat mempertahankan tingkat inflasi dan mengeluarkan kebijakan ketika terjadi masalah. Berkaitan dengan hal itu, penelitian ini bertujuan menganalisis variabel-variabel pengeluaran subkelompok yang berperan dalam menjelaskan tingkat inflasi bulanan di Provinsi Banten. Penelitian ini fokus pada data ekonomi Provinsi Banten tahun 2011-2017, terutama pada Indeks Harga Konsumen (IHK) dari tiga kota besar di Banten, yaitu Serang, Kota Tangerang, dan Kota Cilegon, dengan menggunakan kajian pustaka yang ditunjang dengan analisis deskriptif kuantitatif dan Uji KMO (Kaiser-Meyer-Olkin), Uji Bartlett, serta Analisis Faktor terhadap data sekunder. Dalam analisis faktor digunakan 5 faktor yang berasal dari data inflasi pada 35 subkelompok pengeluaran barang/jasa dengan data series bulanan tahun 2011-2017 (84 bulan). Masing-masing subkelompok terbentuk dari beberapa komoditas yang datanya berasal dari pencatatan harga barang/jasa di setiap minggu atau bulannya. Hasil kajian ini menunjukkan, berdasarkan hasil analisis faktor dari 35 variabel subkelompok yang dipilih, hanya 26 variabel yang dapat dikelompokkan ke dalam 5 faktor, sisanya tidak masuk dalam faktor manapun. Sebanyak 26 variabel tersebut dapat menjelaskan variasi tingkat inflasi bulanan di Provinsi Banten, yaitu sebesar 34 persen. Sisanya dijelaskan oleh faktor lain yang belum masuk di dalam model. Selain itu, dapat dijelaskan pula bahwa inflasi di Provinsi Banten selama periode penelitian disebabkan oleh *demand-pull inflation* dan *cost-push inflation*.

**Kata kunci:** Indeks Harga Konsumen, inflasi, Provinsi Banten



**Margiyono** (Universitas Borneo Tarakan), **Ahmad Fauzi** (Institut Pertanian Bogor), **Ernan Rustiadi** (Institut Pertanian Bogor), **Bambang Juanda** (Institut Pertanian Bogor)

## **KERUGIAN EKOLOGIS DALAM PEMBANGUNAN DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

*JEKP*, Vol. 10, No. 1, Juni 2019, hal. 43-55

### **Abstrak**

Kalimantan Timur adalah salah satu provinsi terkaya di Indonesia yang dikaruniai kelimpahan sumber daya alam. Rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur selama tahun 1990an hingga tahun 2000an mencapai lebih dari 7 persen per tahun, indeks pembangunan manusia (IPM) tertinggi ketiga di Indonesia, dan indeks kualitas lingkungan juga sangat baik. Namun saat ini, Provinsi Kalimantan Timur mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi hingga -1,28 persen yang dibarengi pula dengan peningkatan kejadian bencana alam. Hal ini menunjukkan indikasi bahwa Provinsi Kalimantan Timur mengalami paradoks kesejahteraan dan kelestarian. Oleh karena itu, tujuan studi ini adalah untuk mengetahui nilai kerugian ekologis, dampaknya terhadap kesejahteraan, dan penyebab kerugian ekologis. Untuk menjawab tujuan itu maka digunakan metode *ecological account*. Hasil studi menunjukkan bahwa kerugian ekologis tertinggi disebabkan oleh luasnya lahan kritis, kemudian secara berurutan kerugian akibat eksploitasi batu bara, gas bumi, dan minyak bumi. Kerugian ekologis tersebut telah mengoreksi tingkat kesejahteraan sampai 76 persen dari PDRB. Hasil studi lainnya menunjukkan bahwa tingginya kerugian ekologis disebabkan oleh lemahnya peraturan daerah yang berkaitan dengan lingkungan dan penegakan hukum. Akhirnya, studi ini merekomendasikan bagi para pembuat kebijakan bahwa dalam upaya untuk meningkatkan pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur atau daerah lain yang memiliki karakteristik yang sama maka perlu merehabilitasi lahan kritis untuk aktivitas yang produktif, diikuti dengan transformasi struktur ekonomi yang lebih berorientasi pada sumber daya alam yang dapat diperbaharui, serta melakukan revisi peraturan daerah tentang lingkungan dengan menerapkan pendekatan insentif dan disinsentif.

**Kata kunci:** pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, bencana, perhitungan ekologis, regulasi

**Hariyadi** (Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI)

## **ISU SOSIAL-BUDAYA DAN EKONOMI SEPUTAR FENOMENA PENJUAL MADU WARGA SUKU BADUY KE WILAYAH DKI JAKARTA DAN SEKITARNYA**

*JEKP*, Vol. 10, No. 1, Juni 2019, hal. 57-72

### **Abstrak**

Fenomena masyarakat Suku Baduy yang menjual madu ke Jakarta dan sekitarnya mencerminkan fenomena umum seiring dengan adanya pergeseran pola kehidupan, rasionalisme ekonomis, faktor pertumbuhan demografis, dan efek-tetes gaya hidup masyarakat non-Suku Baduy sendiri. Di dalam jangka panjang, bagaimanapun fenomena ini dapat merugikan masyarakat Suku Baduy itu sendiri. Sangat terbatasnya tingkat pendidikan dan tingginya keterikatan terhadap nilai-nilai sosio-budaya mereka, fenomena ini akan menghadapkan mereka pada nilai-nilai sosio-budaya dan ekonomi masyarakat urban. Studi ini ditujukan untuk menganalisis faktor-faktor apa saja yang mendorong terjadinya fenomena tersebut dan dampaknya terhadap keberadaan sistem kehidupan sosio-budaya mereka, serta apa yang perlu dilakukan pemerintah terhadap persoalan ini. Dengan menggunakan kerangka pemikiran tentang perubahan sosial dan pembangunan sistem kehidupan sosial budaya, kajian dasar dengan pendekatan kualitatif menyimpulkan bahwa konteks kuatnya nilai-nilai sosio-budaya dan ekonomis setempat sebagai modal kehidupan utama, fenomena masyarakat Suku Baduy tersebut dapat berpotensi menggerus nilai-nilai sosio-budaya dan ekonomi masyarakat Suku Baduy tersebut. Kajian ini merekomendasikan pemerintah pusat dan daerah untuk mengawal implementasi program perhutanan sosial dan kebijakan masyarakat hukum adat untuk mempertahankan sistem kehidupan sosio-ekonomi dan budaya masyarakat tersebut. Keperluan 'intervensi' pemerintah untuk mendorong kebijakan-kebijakan afirmatif untuk mengelola fenomena tersebut menjadi hal yang perlu mendapatkan kemauan politik pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah.

**Kata kunci:** Suku Baduy, penjual madu, nilai-nilai sosio-budaya dan ekonomis, perubahan sosial, persoalan sosial

Lesmana Rian Andhika (Universitas Padjadjaran)

## MODEL SISTEM DINAMIS: SIMULASI FORMULASI KEBIJAKAN PUBLIK

*JEKP*, Vol. 10, No. 1, Juni 2019, hal. 73-86

### Abstrak

Model Sistem Dinamis dapat menjadi alat pendukung pengambilan keputusan praktis yang memungkinkan untuk menguji berbagai skenario formulasi kebijakan. Penelitian ini berfokus untuk menggambarkan Model Sistem Dinamis formulasi kebijakan dalam sebuah simulasi, tujuan dari penerapan model tersebut untuk mengamati berbagai struktur yang kompleks, dan mungkin memengaruhi tujuan berdasarkan fenomena masalah yang teridentifikasi. Selain itu, Model Sistem Dinamis dapat melihat perubahan perilaku kebijakan dan memungkinkan skema umpan balik untuk memberikan arus informasi merancang formulasi kebijakan yang lebih kompleks. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan *meta-data-analysis*, bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan secara sistematis tentang fenomena tertentu melalui analisis data yang diolah dari data sekunder terpilih. Untuk mengembangkan argumentasi penelitian ini juga merujuk kepada beberapa kasus penelitian terdahulu dan diperlakukan sebagai bukti. Hasil penelitian ini memberikan informasi bahwa dalam model simulasi formulasi kebijakan dengan sistem dinamis digunakan aspek *analysis, planning, dan control*. Ketiga aspek ini menyediakan sarana untuk menilai kemungkinan penyebab penyimpangan, menghasilkan berbagai kemungkinan analisis dari berbagai sumber informasi, metode, referensi untuk menetapkan umpan balik dari semua analisis yang terkait dalam sistem dinamis. Dengan demikian memberikan peringatan dini tentang perlunya tindakan lebih lanjut, namun dari ketiga aspek tersebut mungkin menimbulkan efek, perubahan dan penyimpangan satu bagian dari sistem, dan sering berbeda dari pada yang dimaksudkan. Untuk itu penyimpangan memberikan sinyal untuk analisis tambahan, apakah kebijakan/strategi telah diterapkan secara efektif.

**Kata kunci:** simulasi, model, sistem dinamis, formulasi kebijakan

# Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik

Mensinergikan Kebijakan dan Pemberdayaan Ekonomi

VOL. 10, NO. 1, JUNE 2019

P-ISSN: 2086-6313

E-ISSN: 2528-4673

The keywords noted here are the words which represent the concept applied in a writing. These abstracts are allowed to copy without permission from the publisher and free of charge.

Saputri Kusumaningrum (Politeknik Statistika STIS) dan Risni Julaeni Yuhan (Politeknik Statistika STIS)

## **ECONOMIC GROWTH OF PROVINCES IN INDONESIA BASED ON INCLUSIVE GROWTH COMPOSITE INDEX AND THE INFLUENCE FACTORS**

*JEKP*, Vol. 10, No. 1, June 2019, pp. 1-17

### **Abstract**

*In 2016, the high growth of Gross Regional Domestic Product (GRDP) in several provinces in Indonesia was also followed by high income inequality, poverty and unemployment, such as in Papua, Gorontalo, and Southeast Sulawesi. This condition is not in accordance with the concept of inclusive growth. The concept explains that in achieving economic growth all levels of society must participate in the process and economic growth can also be enjoyed by all levels of society. Therefore, the purpose of this study was to find out the level of growth of inclusive provincial achievements in Indonesia in 2016 and analyze the factors that influence these achievements. This study uses 2 methods, namely the inclusive growth composite index adopted from McKinley (2010) and multiple regression to answer related factors that influence it. The data used is sourced from the BPS, the Ministry of Health, and Bank Indonesia. The results show that there are no provinces in Indonesia that have achieved inclusive growth that excelled (index values 8 to 10) in 2016. Most provinces in Indonesia achieved satisfactory inclusive growth (index values 4 to 7) and there were two provinces having unsatisfactory categories (index value < 4) namely Papua and East Nusa Tenggara. In addition, this study analyzes the factors that influence the inclusive growth of provinces in Indonesia using multiple linear regression analysis. The results of regression analysis show that gross fixed capital formation, trade openness, and the ratio of MSME credit to GRDP affect inclusive growth.*

**Keywords:** *economic growth, inclusive growth, inclusive growth composite index*

K. Riesta (Kobe University)

**THE SPILLOVER EFFECTS FROM FOREIGN DIRECT INVESTMENT (FDI) ON LABOR PRODUCTIVITY: EVIDENCE FROM INDONESIAN MANUFACTURING SECTOR**

JEKP, Vol. 10, No. 1, June 2019, pp. 19-30

**Abstract**

*Despite growing concern regarding the productivity benefits of foreign direct investment (FDI), few studies have been conducted on the impact of FDI spillovers on domestic firms' labor productivity in Indonesia. This study aims to do three things. First, it examines the effect of FDI spillovers on domestic firms' productivity. Second, it investigates the short-term and long-term effects of FDI spillovers on domestic firms' productivity. Third, it explores the impact of FDI spillovers on domestic firms' productivity in different groups of industries based on their factor intensity. Micro-level panel data covering about 20,000 medium and large manufacturing establishments in each year over the period 2010 and 2014 was employed. This study suggests that, within the same industry, horizontal spillovers are associated with domestic firms' productivity: this relationship is negative in the short-term but positive in the long-term. This study's findings also demonstrate that, across industries, there are negative backward spillover effects on domestic firms' productivity. In addition, this study points out that FDI spillovers affect domestic firms' productivity effectively when they are capital-intensive. Therefore, the results imply the importance of maintaining a long-term perspective toward foreign-invested firms in Indonesia and the government needs to stimulate policies that can enhance domestic firms' capacity to supply intermediate materials and capital to foreign firm in downstream market by truncating the technology gap between foreign and domestic firms.*

**Keywords:** FDI spillovers, horizontal spillover, backward spillover, labor productivity

Euis Naya Sari (Pusdiklat Badan Pusat Statistik)

**FACTOR ANALYSIS OF MONTHLY INFLATION IN BANTEN PROVINCE, 2011-2017**

JEKP, Vol. 10, No. 1, June 2019, pp. 31-41

**Abstract**

*Understanding the changes of inflation rate in a specific region is very essential, in order for the local government to maintain the inflation and to issue policies when inflation instability occurs. Inflation rate is one of the important indicators that reflects the economic development of a region. Inflation rate is measured by involving several variables taken from various types of expenditures. This study therefore aims to analyze subgroup expenditure variables which play significant role in explaining the monthly inflation rate in Banten Province, by focusing on the Consumer Price Index of three major cities, i.e. Serang, Tangerang, and Cilegon, using literature studies supported by quantitative descriptive analysis Kaiser-Meyer-Olkin Test, Bartlett Test, and factor analysis. For the factor analysis, the monthly data series for the period of 2011-2017 (84 months) consisting of 35 subgroups of goods/services, each of which is formed by several commodities, is analyzed. The data is obtained from the prices of goods/services recorded in every week or month. The results showed that, based on the factor analysis, only 26 variables out of 35 subgroup variables can be grouped into 5 factors, the remaining subgroup variables cannot be included in any factor. These 26 variables can explain as much as 34 percent in the variation of the monthly inflation rate. Meanwhile, the other 66 percent is explained by other factors which are not included in the model. In addition, the study also concluded that the causes of inflation during the study period were demand-pull inflation and cost-push inflation.*

**Keywords:** Consumer Price Index, inflation, Banten Province

Margiyono (Borneo Tarakan University), Ahmad Fauzi (IPB University), Ernan Rustiadi (IPB University), Bambang Juanda (IPB University)

### **ECOLOGICAL COST IN EAST KALIMANTAN PROVINCE DEVELOPMENT**

JEKP, Vol. 10, No. 1, June 2019, pp. 43-55

#### **Abstract**

*East Kalimantan is one of the richest provinces in Indonesia that is blessed with an endowed of natural resources. East Kalimantan's Province average economic growth during the 1990s and 2000s was more than 7 percent per year; the third highest human development index (HDI) in Indonesia and the environmental quality index (EQI) were also very good. At present, East Kalimantan Province experiences a contraction in economic growth up to -1.28 percent, even of ecological disasters also increases. This shows that East Kalimantan Province experienced a wellbeing paradox and sustainability paradox. Therefore, is very interesting to research with the aim of knowing the value of ecological losses, their impact on welfare and the causes of ecological losses. To achieve that goal, an ecological account method is used. The results of the study showed that the highest environmental losses caused by the extent of the critical land, followed by sequentially losses due to the exploitation of coal, natural gas, and petroleum. The ecological losses have corrected the welfare level to 76 percent of Gross Domestic Product (GDP). Other result of this study showed weak environmental regional regulation and enforcement. Finally, this study provided some policy recommendations to elevate the development of East Kalimantan Province or similar others region with the same characteristic, that is to rehabilitate critical land by using it to support productive activities. Moreover, critical land rehabilitation should be followed by structural transformation towards renewable resource-oriented economy and also to revise environmental regulations by implementing incentive and disincentive approaches*

**Keywords:** *sustainable development, natural resources, disaster, ecological account, regulation*

Hariyadi (Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI)

### **(SOCIO-CULTURAL AND ECONOMIC ISSUES REGARDING THE BADUY PEOPLE PHENOMENA SELLING TRADITIONAL HONEY TO JAKARTA AND ITS SURROUNDING AREAS)**

JEKP, Vol. 10, No. 1, June 2019, pp. 57-72

#### **Abstract**

*The Baduy people phenomena selling their traditional honey to Jakarta and its surrounding areas reflects common phenomena amid changes in the social lives, economic rationalism, demographic changes, and spill-over effect from other people's life style. In the long term, however, such a phenomenon may disadvantage the community it self. With the very limited rate of their access to education and high embeddedness to their social and cultural values, this phenomenon may expose them to the urban people values. This study aims to analyse factors driving the phenomena, analysing what impacts the phenomena may pose to the Baduy people socio-cultural life, and finally what government may responds to this issue. By using the social changes and socio-cultural life system theoretical perspective, this basic qualitative study concluded that in the context of strengthened socio-cultural and economic values putting land as living invaluable modalities, the Baduy people phenomenon selling their traditional honey to Jakarta and its surrounding areas may give an impact to the degrading of the community's socio-cultural and economic values. This study recommends the needs for the government to thoroughly oversee the implementation of social forestry program and to set an affirmative policies to manage social issues in the Baduy indigenous people including to this phenomena.*

**Keywords:** *Baduy customary community, honey-sale phenomena, socio-cultural and economic values, social issues, social change*

Lesmana Rian Andhika (Padjadjaran University)

**DYNAMIC SYSTEM MODEL: SIMULATION METHOD IN FORMULATION PUBLIC POLICY**

*JEKP*, Vol. 10, No. 1, June 2019, pp. 73-86

**Abstract**

*The Dynamic System Model can be practical decision-making tools that allow testing various scenarios of policy formulation. This study focuses on describe policy formulation in a simulation using Dynamic System Model, the purpose of applying the model is to observe a variety of complex structures and may influence the objectives based on the phenomenon of the identified problem. Furthermore, Dynamic System Model can see changes in policy behavior and allow feedback schemes to provide information flows to design complex policy formulations. This study was conducted with a meta-data-analysis approach, aimed to develop systematic knowledge of certain phenomena through analysis of data processed from selected secondary data. To develop argumentation, this study also refers to several cases of previous research and treated as evidence. The results of this study provide information that in a policy formulation simulation model with a dynamic system used aspects of analysis, planning, and control. These three aspects provide a means for assessing the possible causes of irregularities, resulting variety of possible analyzes of various sources of information, methods, references to determine feedback from all related analyzes in a dynamic system. Thus, provide an early warning about the need for further action, but from these three aspects might have an effect, change and deviation from one part of the system, and often differ from what was intended. For this reason, irregularities provide a signal for additional analysis, whether the policy/strategy has been effectively implemented.*

**Keywords:** *simulation, model, dynamic system, policy formulation*